BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agropolitan

2.1.1 Pengembangan Agropolitan

Pengembangan agropolitan menurut Friedmann dalam Haryono (2008) memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan kebutuhan dasar dilihat dari segi konsumsi, yang prosedurnya dapat dilakukan dengan mengestimasi kebutuhan dasar dalam perhitungan material yang tepat (kalori, protein, yard dalam pakaian, meter persegi dalam ruang hidup, dll) dan kemudian menghitungnya dengan nilai uang. Unit fundamental dari penentuan kebutuhan dasar, dalam praktek perencanaan dan hubungan yang saling melayani adalah suatu unit teritorial yang cukup besar untuk mencukupi sendiri kebutuhan dasarnya dan cukup kecil untuk pertemuan secara langsung dalam perencanaan dan pembuatan keputusan.

Kota agropolitan akan diorganisasikan dengan prinsip pemenuhan sendiri secara relatif dalam kebutuhan dasar. Ini berarti bahwa karakteristik ekonomi yang ada merupakan campuran antara pertanian dengan industri, tetapi dalam produksi industri mendominasi. Ini juga berarti bahwa kota dalam strukturnya merupakan klaster saling ketergantungan dari unit teritorial di mana distrik mempunyai hubungan dengan level desa. Tergantung pada ukurannya, urban (kota) sebagai suatu keseluruhan mungkin meliputi suatu wilayah atau subwilayah. Secara fisik kota agropolitan tidak berbeda secara nyata dengan daerah perdesaannya. Sebagai suatu unit spasial yang menjadi ciri utamanya adalah kerapatan relatifnya dan struktur ekonomi (Friedmann dalam Haryono, 2008).

Sedangkan Ertur dalam Haryono (2008) menyatakan bahwa penekanan utama dalam penguatan agropolitan didasarkan pada metode sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi pertanian dan agroindustri,
2. Peningkat partisipasi tenaga kerja,
3. Peningkatan permintaan barang dan jasa,
4. Peningkatan inovasi teknologi produksi,

5. Perluasan kapasitas untuk ekspor.

Pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya agro-processing skala kecil menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi permukiman di perdesan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal yang penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota.

2.1.2 Kawasan Agropolitan

Definisi agropolitan menurut Rustiadi et al. (2011) adalah kawasan yang merupakan sistem fungsional yang terdiri dari satu atau lebih kota-kota pertanian (agropolis) pada wilayah produksi pertanian tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya sistem keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan-satuan system permukiman dan sistem agribisnis, terwujud baik melalui maupun tanpa melalui perencanaan formal. Agropolis adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Sedangkan pengembangan Agropolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya menumbuhkan kota-kota kecil berbasis pertanian (agropolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud menciptakan pembangunan berimbang dan keterkaitan desa-kota yang sinergis dan pembangunan daerah.

Tujuan dari pengembangan agropolitan sebagai konsep pembangunan wilayah dan perdesaan adalah (Rustiadi, 2011) :

1. Menciptakan pembangunan desa-kota secara berimbang,
2. Meningkatkan keterkaitan desa-kota yang sinergis (saling memperkuat),
3. Mengembangkan ekonomi dan lingkungan permukiman perdesaan berbasis aktivitas pertanian,

4. Pertumbuhan dan revitalisasi kota kecil
5. Diversifikasi dan perluas basis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
6. Menciptakan daerah yang lebih mandiri dan otonom,
7. Menahan arus perpindahan penduduk perdesaan ke perkotaan secara berlebihan (berkontribusi pada penyelesaian masalah perkotaan),
8. Pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,

Sedangkan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik wilayah pengembangan agropolitan antara lain (Rustiadi, 2011) :

1. Memiliki daya dukung dan potensi fisik kawasan yang memadai (kesesuaian lahan dan agroklimat),
2. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan (minimal merupakan sektor basis di tingkat kabupaten/provinsi),
3. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang cukup memadai untuk tercapainya economic of scale dan economic of scope (biasanya dalam radius 3-10 km, mencakup beberapa desa hingga gabungan sebagian satu hingga tiga kecamatan),
4. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman yang cukup memadai dalam standar perkotaan,
5. Tersedianya prasarana dan sarana produksi yang memadai dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
6. Adanya satu atau beberapa pusat pelayanan skala kota kecil yang terintegrasi secara fungsional dengan kawasan produksi di sekitarnya,
7. Adanya sistem manajemen kawasan dengan ekonomi yang cukup,
8. Adanya sistem penataan ruang kawasan yang terencana dan terkendali,
9. Berkembangnya aktivitas-aktivitas sektor sekunder (pengolahan), dan tersier (jasa dan finansial),
10. Kelembagaan ekonomi komunitas lokal yang kuat, akses masyarakat local terhadap sumberdaya ekonomi (terutama lahan) mencukupi.

Menurut Sudaryono dalam Haryono (2008) agropolitan adalah suatu model pengembangan kawasan yang berbasis pada pertanian dengan mengimplementasikan potensi sumberdaya wilayah yang ada dalam upaya memenuhi permintaan produksi

pertanian. Selanjutnya dijabarkan pula bahwa esensi konsep agropolitan adalah: (1) memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (urbanism) pada lingkungan perdesaan, (2) memperluas hubungan sosial di perdesaan ke luar batas-batas desa sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik (agropolitan distrik), (3) merupakan kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman dan memberi kehidupan pribadi dan sosial dalam membangun masyarakat baru, sehingga keretakan sosial dalam proses pembangunan dapat diperkecil, (4) memadukan kepentingan-kepentingan pertanian dan non pertanian di dalam lingkungan masyarakat yang sama, (5) pengembangan sumberdaya manusia dan alam untuk peningkatan hasil pertanian, pengendalian tata air, pekerjaan umum, jasa-jasa dan industri yang berkaitan dengan pertanian dan (6) merangkai agropolitan distrik menjadi jaringan regional.

2.2 Wilayah

2.2.1 Pengertian Wilayah

Secara yuridis, dalam Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional. Sedangkan menurut Isard dalam Rustiadi et al (2011), menganggap pengertian suatu wilayah yang pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batasan-batasan tertentu. Menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya maslah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan social-ekonomi.

Menurut Rustiadi et al (2011), istilah wilayah mengacu pada pengertian unti geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertebtu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Dengan demikian, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) di mana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendekripsian perencanaan dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Dari definisi tersebut, tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat “meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan,

monitoring, pengendalian, maupun evaluasi. Dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi serigkali bersifat dinamis (selalu berubah). Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unti geografis tertentu.

2.2.2 Konsep Wilayah Perencanaan / Pengelolaan Khusus (Wilayah Sistem Ekonomi)

Terdapat bebrapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Perwilayahan mengelompokkan beberapa wilayah kecil dalam suatu kesatuan. Suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukkan wilayah itu sendiri. Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut (Tarigan, 2005:115) :

a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan
b. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogenitas)
c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi
d. Berdasarkan wilayah perencanaan atau program

Menurut Rustiadi et al (2011) wilayah perencanaan atau pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah administrative tapi berupa wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun tidak, sehingga perlu dilakukan rencana pengelolaan. Perwilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaa atau pengelolaan yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu perwilayahan komoditas pertanian harus didasarkan pada kehomogenan factor alami atau tidak. Adanya system perwilayahan komoditas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi system produksi dan distribusi komoditas, karena perwilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan "*comparative advantage*" setiap wilayah. Konsep wilayah homogen menjadi wilayah-wilayah perencanaan sangat bermanfaat dalam (Rustiadi et al, 2011:42) :

a. Penentuan sector basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi daya dukung utama yang ada
b. Pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan tia-tiap wilayah.

Tarigan (2005) menjelaskan bahwa perwilayahan berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi mengenal adanya pusat-pusat pertumbuhan yang masing-masing memiliki daerah belakangnya. Dalam hal ini keseluruhan wilayah ditetapkan bebrapa pusat terlebih dahulu yang biasanya adalah kota-kota besar di dalam satu unit wilayah dan kemudian ditetapkan batas pengaruh dari masing-masnig kota tersebut.wilayah belakang atau wilayah *hinterland* akan cenderung bergantung kepada kota pusat untuk memenuhi kebutuhan dan menjual hasil produksi. Antara pusat kota dan daerah belakangnya akan saling berpengaruh dalam perkembangannya. Namun terdapat kelemahan dari model tersebut yaitu berupa sulitnya menetapkan bataspengaruh dari suatu pasar dari suatu pusat pertumbuhan dan batas pengaruh itu sendiri bias berubah sesuai dengan adanya perubahan di daerah tersebut atau perubahan di wilayah yang berdekatan dan berpengaruh.

2.3 Indikator Pembangunan

Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator pembangunan merupakan sekumpulan cara mengukur tingkat kinerja pembangunan dengan mengembangkan berbagai ukuran operasional berdasarkan tujuan-tujuan pembangunan (Rustiadi et al, 2011:155)

2.3.1 Pendapatan Wilayah dan Pertumbuhannya

Menurut Rustiadi et al (2011), aspek ekonomi adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan indicator pembangunan wilayah. Diantara berbagai indicator ekonomi, indicator mengenai pendapatan masyarakat di suatu wilayah merupakan indikator terpenting. Utnuk itu diperlukan pemahaman mengenai konsep-konsep dan cara mengukur pendapatan masyarakat di suatu wilayah.

Di Indonesia, istilah pendapatan wilayah (*regional income*) seringkali disebut dengan istilah pendapatan daerah atau pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Namun pendcapatan daerah yang itnggi belum merupakan sebuah jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (Rustiadi et al, 2011). Naamun dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah tersebut,

termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Sampai saat ini indikator yang umum digunakan sebagai tolak ukur kemajuan dan pembangunan wilayah adalah Produk Domestik Regional (PDRB) baik untuk tingkat kecamatan maupun kabupaten. PDRB merupakan total nilai tambah kotor (bruto) yang dihitung dari jumlah upah atau gaji, keuntungan-keuntungan perusahaan, sewa lahan, bunga, penyusutan, dan pajak-pajak. PDRB merupakan gambaran mengenai jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, sehingga dapat dikatan sebagai ukuran produktifitas wilayah secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah. Pengukuran nilai PDRB sering digunakan mengingat sebagian besar PDRB yang berlaku diperoleh satu wilayah pada akhirnya akan menjadi pendapatan wilayah tersebut (Rustiadi et al, 2011).

Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut, dan dapat diukur dalam nilai riil yang dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2005). Sedangkan menurut Adisasmita (2005), pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi peningkatan sejumlah komoditas yang digunakan dalam sutu wilayah. Konsep tersebut menyangkut perdagangan yang berkaitan. Beberapa temuan tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari kontribusi secara sektoral dalam struktur ekonomi wilayah. Kecenderungan pergeseran sektoral khususnya sektor pertanian tersebut merupakan salah satu indikasi dari terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah. (Hamberg dalam Kurniadi, 2009)

Rustiadi et al (2011) mengemukakan tingkat PDRB belum menjamin peningkatan kesejahteraan bagi sitap individu dalam masyarakat. Bahkan mungkin sekali peningktan pendapatan hanya terdapat pada kalangan tertentu saja, sedangkan lainnya relative tetap atau menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan ekonomi. Pendapatan wilayah dapat bertambah atau berkurang akibat adanya aliran uang yang masuk atau keluar ke dan dari wilayah tersebut. Namun tidak semua pendapatan wilayah otomatis akan menjadi pendapatan masyarakatnya (personal income), akrena adanya pajak pendapatan perusahaan (corporate income taste) dan iuran atau sumbangan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan

sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Suharto dalam Haryono, 2008). Pembangunan melalui investasi sosial mempunyai dampak langsung berupa penciptaan lapangan kerja, prakarsa partisipasi dalam pembangunan yang lebih luas biarpun pada awalnya dalam lapangan pembangunan sosial yang sederhana. Investasi dalam pembangunan sosial akan meningkatkan produktivitas karena adanya rasa ikut memiliki serta kepercayaan melalui partisipasi yang lebih ikhlas. Karena partisipasi itu dilakukan dengan ikhlas, maka lebih mudah memberikan kepuasan berkat dipenuhinya hak-hak sosial ekonomi dan budaya yang sangat mendasar.

Namun dapat dipastikan penduduk berubah, dari sekadar sebagai penonton pembangunan menjadi pelaku pembangunan. Kalau proses ini dilakukan dengan baik dan konsisten, pada waktunya akan menumbuhkan massa baru, workfare society atau yang lebih berkualitas dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang disertai kepuasan sosial yang sangat tinggi.

2.3.2 Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial muncul dan ramai diperdebatkan sejak awal tahun 1990-an. Topik perdebatan tidak hanya terbatas pada substansinya, tetapi juga menyangkut terminologi yang dianggap lebih tepat untuk mewakili gagasan baru itu. Ada beberapa terminologi yang ditawarkan, antara lain Pembangunan Alternatif, Pembangunan Berbasis Rakyat, Pembangunan Partisipatoris. Isu sentral dari gagasan tersebut adalah mencari alternatif bagi pembangunan yang berfokus pertumbuhan, yang menempatkan uang sebagai yang paling pokok (capital centered development), berubah menjadi pembangunan sebagai proses yang manusiawi (people centered development). Kenyataan bahwa pembangunan yang sangat berfokus pertumbuhan memang telah berhasil dengan gemilang mewujudkan kemakmuran, tetapi gagal mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, bahkan sebaliknya banyak membawa masalah yang sulit dicari pemecahannya (Tangdilintin, 1999).

Wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan sosial, mulai berkembang dan diterima secara luas pula pada tahun 1970-an, dengan berbagai varian pemikiran yang dipelopori oleh berbagai disiplin ilmu yang bebeda. Secara garis besar muncul berbagai pemikiran yang memberi makna yang berbeda terhadap pembangunan sosial. Ada yang

sangat menyederhanakan sebagai identik dengan pelayanan (services), ada yang memberi makna sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan, dan bahkan pembangunan etnis (ethnodevelopment).

2.3.2.1 Kelembagaan

Selain dukungan aspek prasarana wilayah, dalam pengembangan wilayah diperlukan juga pengembangan kelembagaan. Kelembagaan (institutional) dalam hal ini dapat merupakan aturan main (rule of game) dan organisasi yang berperan penting dalam mengatur penggunaan sumberdaya secara efisien, merata, dan berkelanjutan (*sustainable*). Paling tidak ada tiga komponen utama yang mencirikan suatu kelembagaan yaitu: (1) batas yuridiksi, yang menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam suatu kelembagaan, (2) property right, yang mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur oleh hukum, adat, dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. dan (3) aturan representasi, yang menentukan siapa yang berhak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumberdaya tersebut (Rustiadi et al., 2011).

Menurut Deptan (2002) dalam pengembangan kawasan agropolitan keberadaan kelembagaan menjadi suatu prasyarat penting yang meliputi kelembagaan ekonomi (pasar), lembaga keuangan, kelembagaan petani (kelompok, koperasi, dan asosiasi), kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian/BPP). Selain itu perlu kelompok kerja yang memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan. Kelompok kerja (pokja) ditetapkan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota atau gubernur bila wilayah kawasan agropolitan merupakan lintas kabupaten/kota. Keberadaan dan peranan kelembagaan tersebut akan menentukan keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan.

Menurut Rustiadi et al (2011) indikator perkembangan kelembagaan dapat dilihat dari:

a. Perkembangan peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan.
b. Ada dan tidaknya perkembangan lembaga-lembaga (organisasi) masyarakat baik formla maupun non formal sosial, maupun lembaga pemerintahan

Hamid dalam Haryono (2008) mengemukakan bahwa kelembagaan petani dalam pengembangan agropolitan penting karena dalam usahatani skala kecil yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan aset produktif, modal kerja, posisi tawar menawar, dan kekuatan politik ekonomi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut diperlukan wadah untuk menggalang persatuan di antara mereka melalui pembentukan organisasi petani lokal. Pengembangan kelembagaan petani juga dibutuhkan dalam pemberdayaan petani agar dapat tumbuh berkembang secara dinamis dan mandiri sebagai langkah di dalam mewujudkan strategi pembangunan perdesaan berbasis agribisnis.

2.3.2.2 Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan pendududk dalam proses pembangunan dapat pula diartikan bagaimana penduduk memanfaatkan program pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah, tetapi juga berarti bagaimana prakarsa dan kreativitas penduduk sendiri (Rustiadi et al, 2011). Partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi keberlangsungan program dari pemerintah. Dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan program pemerintah akan berjalan lancer dan dapat menciptakan karakter masyarakat yang lebih mandiri. Bertemunya akses pembangunan dari pemerintah atas dan mendapat respon yang baik dari masyarakat merupakan inti dari partisipasi penduduk dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat terdiri atas tiga tujuan yaitu (Rustiadi et al, 2011) :

a. Sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektivitas keputusan perencanaan
b. Alat untuk mengorganisir persetujuan dan pendukungan untuk tujuan program serta perencanaan
c. Pembenaran, perlindungan individu maupun kelompok

Keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan dapat menempatkan penduduk baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Penduduk sebagai subyek pembangunan penduduk diharapkan dapat ikut serta dalam pilihan-pilihan pembangunan di daerahnya. Sedangkan penduduk sebagai obyek pembangunan adalah penduduk ditempatkan sebagai sasaran pembangunan (Rustiadi et al, 2011).

Menurut Rustidi et al (2011), terdapat bentuk respon penduduk terhadap upaya pembangunan dari pemerintah, yaitu:

a. Pemanfaatan penduduk terhadap fasiliitas dan akses pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia.
b. Respon masyarakat baik individu atau kelompok berupa kegiatan utnuk menunjang upaya pembangunan dari pemerintah, seperti pendiriran sekolah swasta, pendirian balai kesehatan, koperasi dan lain sebagainya.

2.4 Tinjauan Analisis

2.4.1 Analisis Growth-Share

Analisis *growth share* digunakan untuk mengetahui nilai produksi pada komoditas. Analisis *Growth* untuk melihat tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun, dan analisis *Share* berfungsi untuk melihat besar nilai kontribusi komoditas pada tingkat kabupaten.

$$Growth = \frac{\mathrm{Tn} - (\mathrm{Tn} - 1)}{\mathrm{Tn} - 1} \mathrm{x}\ 100\ \%$$

Keterangan :

Tn = ∑ produksi sektor tahun ke n

Tn-1 = ∑ produksi sektor tahun ke n-1

Perhitungan dari formula tersebut dirata-rata dan dijumlahkan sesuai dengan jumlah data dan hasilnya dijadikan sebagai standar bagi rata-rata produksi lain. Bila didapat tanda positif (+) dinyatakan komoditas atau produksi tersebut berpotensi, sedangkan bila tana negatif (-) dinyatakan bahwa produksi atau komoditas tersebut kurang berpotensi. Analisis *Share* membantu mengkarakteristikan struktur ekonomi berbagai wilayah.

$$Share = \frac{\mathrm{NP1}}{\mathrm{NP2}} \mathrm{x}\ 100\ \%$$

Keterangan :

NP_1 = Nilai produksi komoditas x di Kawasan Agropolitan Kecamatan Poncokusumo

NP_2 = ∑ produksi sektor tahun ke n-1

Dari hasil analisis dengan menggunakan metode *growth share* akan memberikan beberapa nilai, dengan keterangan nilai ssebagai berikut :

1. Bila *share* > 1 diberi nilai 3, bila *share* = 1 maka diberi nilai 2, dan bila *share* < 1 diberi nilai 1.
2. Menyatakan besaran kontribusi adalah dengan melihat ketentuan berikut:
   a. Bila *share* yang diberi nilai 2 maka diberi tanda (+) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan besar.
   b. Bila *Share* diberi nilai 1 maka diberi tanda (-) dan dinyatakan kontribusi yang diberikan kecil (rendah).
   c. Nilai 2 dinyatakan memiliki kontribusi yang besar dengan asumsi bahwa perkembangan berikutnya akan mengalami peningkatan atau penurunan dalam kurun waktu 3 tahun kontribusi yang diberikan tetap.

Dari hasil *growth share* dapat diagramkan sebagai berikut: (Gambar 2.1)

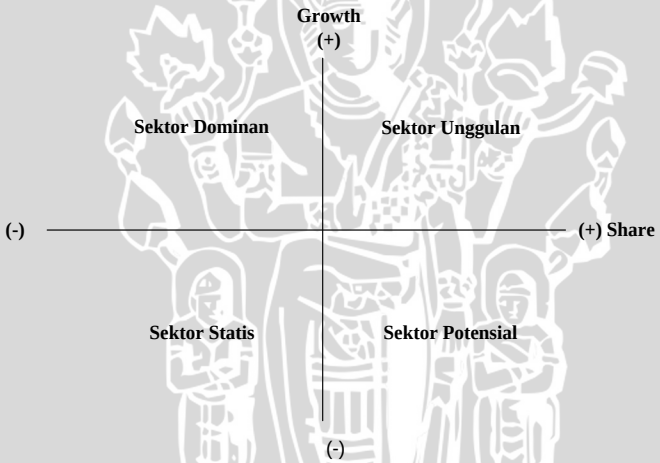

Gambar 2.1 Diagram Growth-Share

1. Sektor unggulan

   Komoditas yang masuk dalam klasifikasi sektor unggulan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi (+) dan kontribusi yang diberikan cukup besar (+). Sektor unggulan nantinya akan menjadi sektor basis suatu wilayah.

2. Sektor potensial

   Komoditas yang masuk dalam sektor potensial menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) tetapi kontribusi yang

diberikan cukup besar (+). Sektor potensial ini nantinya mampu dijadikan sebagai sektor basis dalam jangka panjang.

3. Sektor dominan

   Komoditas yang masuk dalam sektor dominan menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi (+) akan tetapi memiliki kontribusi yang kecil (-). Sektor dominan dapat dikembangkan menjadi sektor basis dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus.

4. Sektor statis

   Komoditas yang masuk dalam sektor statis menunjukkan bahwa komoditas tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (-) dan memiliki kontribusi yang kecil (-).

2.4.2 Analisis LQ

Metode LQ adalah metode yang membandingkan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor tertentu disuatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Tujuan metode LQ ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) dalam suatu wilayah. Secara matematis, LQ dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan :

Eij : variabel regional sektor i di wilayah j

Ej` : variabel regional di wilayah j

Ein : variabel regional di sektor i di wilayah n (kabupaten/propinsi)

En : variabel regional perekonomian kabupaten/propinsi

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika nilai LQ<1, maka sektor yang bersangkutan kurang terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga bukan merupakan sektor unggulan.

b. Jika nilai LQ=1, sektor yang bersangkutan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan sektor sejenis di tingkat daerah tertentu, sehingga hanya cukup untuk melayani kebutuhan daerah sendiri.
c. Jika nilai LQ>1, sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan.

2.4.3 Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digunakan untuk melihat perkembangan kondisi sosial masyarakat wilayah studi. Apabila kesejahteraan masyarakat semakin membaik, maka semakin membaik pula kondisi sosial masyarakat wilayah, dan begitu pula sebaliknya (Teguh, 2008). Berikut merupakan rumus menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat:

$$TKKx(n) = \frac{KKx(n)}{\Sigma\, KK\ (n)}\ x\ 100\%$$

Keterangan :

$TKKx(n)$: Tingkat Kesejateraan Keluarga golongan *x* pada Tahun Berjalan *(n)* (%)

$KKx(n)$: Jumlah keluarga golongan *x* pada Tahun *n* (KK)

$\Sigma\, KK\ (n)$: Jumlah keseluruhan keluarga pada tahun *n* (KK)

(n) : Tahun Berjalan

2.4.4 Analisis Partisipatif

Analisis partisipatif adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya terhadap suatu rencana, program atau proyek (Wicaksono, 2010). Kemudian dalam analisis partisipatif ini, setiap aspek dari para stakeholder seperti kepentingan, kekhawatiran, konflik antarkepentingan, potensi, dan kelemahan serta implikasi akan dijabarkan untuk mengetahui setiap akar masalah serta kebutuhan masyarakat dan kelembagaannya.

Terdapat 5 tingkatan partisipasi dalam masyarakat menurut *McDowell* dalam Natasha (2004) yang terbentuk dalam sebuah diagram pada Gambar 2.2 dengan penjelasan pada masing-masing tingkatannya.

Gambar 2.2 Diagram Tingkat Partisipasi

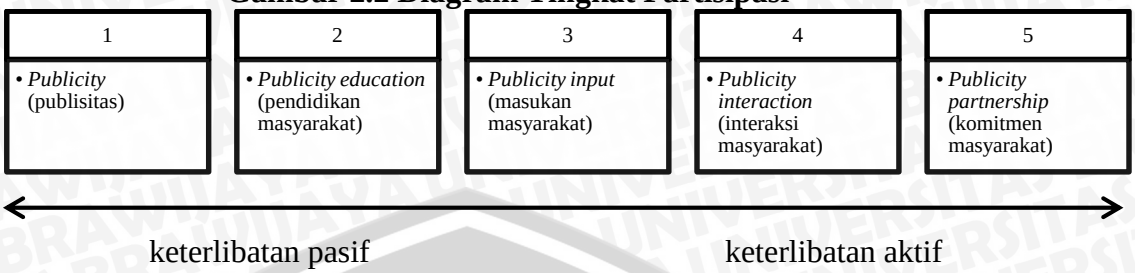

Sumber : *McDowell* dalam Natasha (2004)

a. *Publicity* (publisitas)

   Tahapan awal yang digunakan dalam rangka membangun dukungan masyarakat pada suatu hal

b. *Publicity education* (pendidikan masyarakat)

   Pada tingkatan ini informasi mengenai hal-hal tertentu akan mulai di sosialisasikan dan disebarluaskan, baik oleh pemerintah ataupun masyarkat

c. *Publicity input* (masukan masyarakat)

   Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat sesuai kebutuhan

d. *Publicity interaction* (interaksi masyarakat)

   Komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat dilakukan pada tahapan interaksi masyarakat ini.

e. *Publicity partnership* (komitmen masyarakat)

   Pada tingkatan terakhir ini saran dan masukan pada tahap-tahap sebelumnya diamankan dan mulai bisa dipertimbangkan.

2.4.5 Analisis Kelembagaan

Dalam analisis kelembagaan akan dianalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan berdasarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada penelitian akan digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara kondisi eksisting dengan kesesuaian fungsi kelembagaan yang ada di wilayah studi (Soekanto, 1990)

2.4.6 Analisis Akar Masalah - Akar Tujuan

Analisis akar masalah (Wicaksono, 2010) bertujuan untuk melihat akar dari suatu masalah yang terdapat pada hasil analisis yang telah dilakukan. Analisa Akar Masalah sering dipakai dengan masyarakat sebab sangat visual dan dapat melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama. Selain dengan masyarakat, analisa akar masalah dapat dilakukan dengan meninjau kebijakan yang terkait terhadap wilayah yang dikaji, sehingga membentuk runtutan masalah-masalah. Pada akhirnya didapatkan masalah yang merupakan akar dari masalah utama tersebut. Pembangunan suatu wilayah dapat dimulai dengan mengatasi masalah yang menjadi akar dari masalah utama sehingga dengan mengatasi akar-akarnya maka diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah lain yang disebabkan oleh akar masalah tersebut.

Analisis akar tujuan ini menggambarkan apa saja tahapan-tahapan yang harus ditempuh sehingga akan tercapai suatu tujuan yang diharapkan. Analisis ini meliputi analisis semua sektor yang dipergunakan untuk merumuskan tujuan dari setiap penyelesaiam masalah yang terkait. Hasil dari analisis tujuan akan digunakan untuk menentukan program-program pembangunan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut.

2.4.7 *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

AHP adalah struktur teknik untuk mengorganisir dan menganalisis keputusan yang kompleks. Menurut Saaty (2001), AHP didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode AHP yaitu:

1. Definisikan persoalan dan rinci permasalahan yang diinginkan.
2. Struktur hierarki dari sudut pandang manjerial menyeluruh (dari tingkat-tingkat puncak sampai ke tingkat dimana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan itu)
3. Membuat sebuah matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Dalam matriks ini, pasangan-pasangan elemen dibandingkan berkenaan

dengan suatu kriteria di tingkat yang lebih tinggi. Dalam membandingkan dua elemen kebanyakan orang lebih suka memberi suatu pertimbangan yang menunjukkan dominasi sebagai suatu bilangan bulat.

4. Mendapatkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat matriks di langkah 3.
5. Setelah mengumpulkan semua data banding berpasangan dan mengumpulkan nilai-nilai kebalikannya beserta entri bilangan 1 sepanjang diagonal utama, prioritas dicari dan konsistensi diuji.
6. Laksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hierarki.
7. Menggunakan komposisi secara hierarkis (sistesis) untuk membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria dan jumlahkan semua entri prioritas terbobot yang bersangkutan dengan entri prioritas dari tingkat bawah berikutnya. Hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk tingkat hierarki paling bawah. Jika hasilnya ada beberapa buah, boleh diambil nilai rata-rata aritmatiknya.
8. Evaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalikan setiap indeks konsistensinya dengan prioritas kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak, yang sesuai dengan dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama setiap indeks konsistensi acak juga dibobot berdasarkan prioritas kriteria yang bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Rasio konsistensi hierarki itu harus 10 persen atau kurang.

Untuk mendapatkan matriks perbandingan berpasangan akan diisi berdasarkan skala penilaian perbandingan berpasangan seperti pada Tabel 2.1. Menurut Saaty (1993), skala perbandingan berpasangan terdiri dari:

Tabel 2. 1 Tabel Skala nilai perbandingan berpasangan

Intensitas kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen daripada elemen lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas

Intensitas kepentingan	Definisi	Penjelasan
	lainnya	yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikanya bila dibandingkan dengan i	

Sumber: Saaty, 1993

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai langkah penghitungan analisis hierarki proses:

1. Mamasukkan hasil kuisioner ke dalam tabel berdasarkan tiap perbandingan prioritas menurut masing-masing *expert /* ahli, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perbandingan Prioritas I menurut Expert I

Prioritas I	Variabel 1	Variabel 2	Variabel 3
Variabel 1	X11	X12	X13
Variabel 2	X21	X22	X23
Variabel 3	X31	X32	X33
∑	A	B	C

2. Kemudian menentukan Priority vector (PV) dan Eigen Value (EV). Pertama jumlah nilai dari masing-masing variabel yang sudah ada dinormalisasi yaitu dengan membagi nilai jumlah variabel dengan nilai masing-masing variabel sehingga menghasilkan nilai 1. Selanjutnya nilai hasil normaslisasi tersebut dijumlahkan secara vertical kemudian dikalikan 1/n untuk menghitung nilai priority vector (PV). Lebih jelasnya dapat dilihat dengan cara berikut:

$$PV = 1/n \begin{bmatrix} X11 + X12 + X13 \\ X21 + X22 + X23 \\ X31 + X32 + X33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Xx100\% \\ Yx100\% \\ Zx100\% \end{bmatrix} \rightarrow dicari\ nilai\ yang\ tertinggi$$

Selanjutnya dicari nilai Eigen Value (EV), yaitu penjumlahan total dari jumlah nilai masing-masing variabel yang belum dinormalisasi dikalikan dengan masing-masing nilai priority vector (PV) yang didapat dari setiap variabel. Berikut cara penghitungannya.

$$\lambda_{\text{maks}} = \text{Ax} + \text{BY} + \text{CZ}$$

Setelah itu menghitung indeks konsistensinya (CI) dapat diterima atau tidak, dengan melakukam perhitungan seperti berikut:

$$\text{CI} = \frac{\lambda_{maksimum} - n}{n-1}$$

3. Selanjutnya harus mengetahui dahulu jumlah n dan dilihat RI (Random Consistency Index) seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Tabel Random Consistency Index (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sehingga perhitungan CR (Consistency Ratio):

CR= (CI/ RI) x 100%

Nilai CR harus kurang dari atau sama dengan 10% agar nilai indeks konsistensinya dapat diterima. Bila lebih dari 10%, maka indeks konsistensinya tidak dapat diterima.

2.5 Tinjauan Kebijakan

2.5.1 RTRW Kabupaten Malang 2010

Berdasarkan RTRW Kabupaten Malang tahun 2010 terdapat arahan pengembangan terkait Kawasan Agroplitan Kabupaten Malang antara lain:

a. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khusunya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjingwetan.
b. Mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang
c. Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di Kecamatan Poncokusumo
d. Pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan hasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor di Kecamatan Poncokusumo
e. Pada kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 pasal 65 (RTRW Kabupaten Malang 2010) beserta penjelasannya, disebutkan bahwa:

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui :
   a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
   b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik perseorangan maupun koperasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
   c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
5. Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

2.5.2 Masterplan Agropolitan Kabupaten Malang tahun 2007

Berdasarkan Masterplan Agropolitan Kabupaten Malang tahun 2007 terdapat beberapa arahan rencana dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Malang terutama Kecamatan Poncokusumo yaitu:

a. Rencana zonasi kawasan untuk komoditas unggulan tanaman hortikultura di Kecamatan Poncokusumo antara lain:
   - Apel di Desa Pandansari, Poncokusumo, Wringinanom, Gubuklakah, dan Sumberejo
   - Bawang merah di Desa Wonomulyo, Wonorejo, dan Belung
   - Bawang prei di Desa Gubuklakah dan Ngadas
   - Belimbing di Desa Argosuko
   - Cabe di Desa Karangnongko, dan Wonorejo
   - Kentang di Desa Ngadas
   - Kubis di Desa Karangnongko, dan Wonorejo

- Pepaya di Desa Ngadireso

b. Sebagai salah satu kawasan ekonomi potensial, Kecamatan Poncokusumo dikembangkan sebagai KAPUK Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK) Hortikultura.

2.6 Kerangka Teori

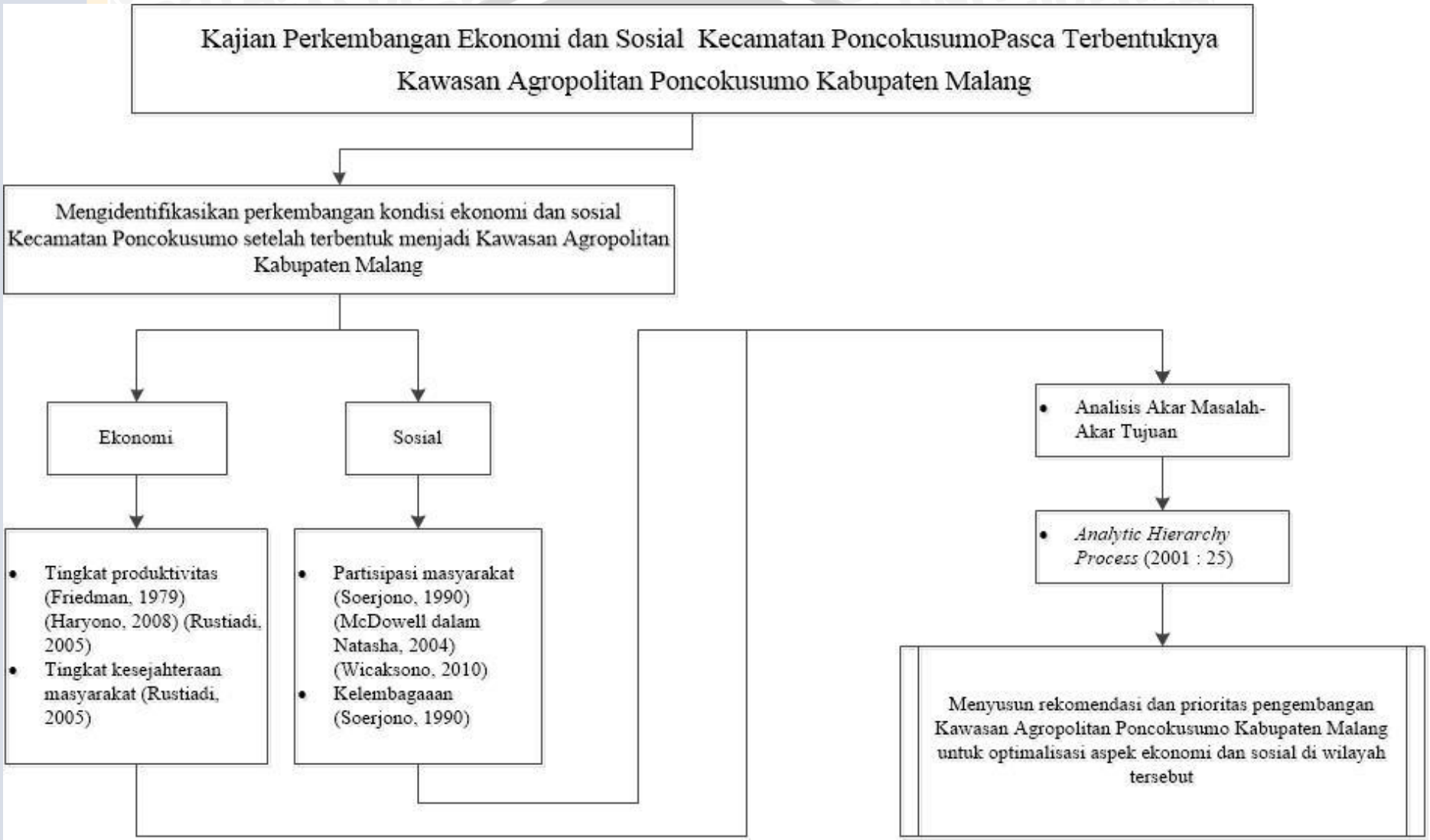

Gambar 2.3 Kerangka Teori

2.7 Studi Terdahulu

Tabel 2.4 Studi Terdahulu

No	Judul-Penulis-Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode analisis	Output	Perbedaan
1	Evaluasi Dampak Program Pengembangan Agroopolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Agropolitan Waliksarimadu Kabupaten Pemalang Sumirin Teguh Haryono Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Tesis 2008)	a. Menganalisis perubahan indeks perkembangan kecamatan dengan adanya perkembangan infrastrukturdan fasislitas kawasan agropolitan b. Menganaslisis perubahan tingkat kemiskinan di kawasan agropolitan c. Menganalisis perkembangan ekonomi di kawasan agropolitan d. Menganalisis persepsi masyarakat atau petani tentang dampak kegiatan pengembangan agropolitan terhadap tingkat pendapatan e. Menganalisis peran kelembagaan yang ada di kawasan agropolitan	a. Karakteristik fisik dasar b. Karakteristik fisik binaan c. Karakteristik ekonomi d. Karakteristik social e. Karakterstik kelembagaan	a. Indeks perkembangan kecamatan b. Tingkat kemiskinan penduduk c. Pendapatan per Kapita d. Pendapatan keluarga petani e. Shift share f. Analisis LQ g. Analisis pangsa sector terhadap PDRB h. Analisis korelasi antara jenis komoditas, aktivitas pertanian, dan tempat tinggal dengan tingkat persepsi (Chi-Square) i. Analisis factor	a. Dari uraian dalam hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan Indeks Perkembangan Kecamatan di kawasan Agropolitan tetapi relatif tidak berbeda dengan di luar kawasan Agropolitan. Program pengembangan kawasan Agropolitan relatif belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. b. Di Kawasan Agropolitan terjadi perkembangan perekonomian dalam beberapa sektor. Pangsa sektor pertanian menurun tetapi tetap mempunyai keunggulan komparatif dengan meningkatnya pemusatan aktivitas di dalam kawasan Agropolitan. Sektor pertanian semakin kompetitif di dalam kawasan Agropolitan, diikuti oleh kompetitifnya sektor industri pengolahan. c. Kelembagaan pemerintah pengelola kawasan adalah Pokja Agropolitan telah berperan dalam mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan Agropolitan, namun masih belum optimal. Sedangkan kelembagaan petani yaitu Asosiasi Petani dan Pedagang Hortikultura (APPH) dan Asosiasi. Petani Kopi (APEKI) berperan sebagai pendorong petani untuk meningkatkan produksi karena dapat menampung sebagian hasil produksi dan memberikan informasi harga pasar. d. Dari indikator perkembangan kecamatan, tingkat kemiskinan, pendapatan per	Mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian Evaluasi Dampak Dalam penelitian Implikasi Kawasan Agropolitasn Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Program Pengembangan Agroopolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Agropolitan Waliksarimadu Kabupaten Pemalang yaitu tidak melakukan analisa indeks perkembangan kecamatan dengan adanya perkembangan infrastruktur dan fasilitas kawasan agropolitan, tidak melakukan analisa tingkat kemiskinan.

No	Judul-Penulis-Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode analisis	Output	Perbedaan
					kapita, dan pendapatan per keluarga petani yang relatif tidak berbeda dengan di luar kawasan Agropolitan mungkin diakibatkan dampak tersebut bersifat jangka panjang dan saat ini dalam masa lima tahun dampaknya tersebut belum terlihat nyata. Akan tetapi dampak terhadap pendapatan petani dirasakan khususnya yang mengusahakan komoditas hortikultura sayuran.	
2	Respon Petani Apel Terhadap Industrialisasi Pertanian (Kasus di Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Nur Baladina 2012 SEPA ; Vol.8 No. 2 Pebruaru 2012 :51-182	a. Menganalisis respo petani apel terhadap industrialisasi pertanian. b. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani apel untuk terlibat dalam industrialisasi pertanian.	a. Luas lahan garapan b. Tingkat pendidikan c. Jumlah keluarga d. Pengalaman berusaha tani e. Pendapatan petani f. Fasilitas infrastruktur g. Ketersediaan modal h. Usia petani	a. Analisis logit model regresi linear, dengan tahap uji seluruh model (Uji G), Uji *Log Likelihood*, Uji *Goodness of Fit (R^2)*, dan Uji *Wald*.	1. Dari 60 responden petani apel, diperoleh hasil penelitian berupa respon petani apel terhadap program industrialisasi pertanian sebagai berikut: a. 55% petani menyatakan ingin terlibat aktif dalam industrialisasi pertanian. Bentuk kegiatannya antara lain: melalui modernisasi distribusi dan koordinasi dalam rantai agroindustri yaitu dengan mentransformasi produk pertanian menjadi bahan baku sebuah home industry apel (22%), maupun melalu modernisasi manufacturing production yaitu memberikan nilai tambah pada produk yang dipasarkan (33%). b. 45% petani menolak terlibat terlibat dalam industrialisasi pertanian karena adanya faktor internal yaitu petani merasa usahatani (on farm) telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran sehingga tidak ingin menambah beban lagi dengan menjalankan program industrialisasi pertanian. 2. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan petani untuk melakukan program industrialisasi pertanian antara lain	Memiliki tujuan penelitian yang berbeda, selain itu dalam penelitian Pengaruh Kawasan Agropolitan Poncokusumo Kabupaten Malang tidak menggunakan analisis regresi melainkan menggunakan analisis AHP untuk menemukan prioritas pengembangan

No	Judul-Penulis-Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel	Metode analisis	Output	Perbedaan
					variabel luas lahan garapan (X1) dan pemasaran (X8) pada tingkat signifikansi 5%, serta tingkat pendidikan (X2) dan pengalaman berusahatani (X4) pada tingkat signifikansi 10%.	